



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 314 /KEP/HK/2024

TENTANG

**POS KOMANDO SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA KEKERINGAN
DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

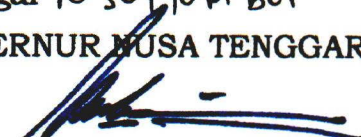
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan yang melanda 21 (dua puluh satu) kabupaten dan 1 (satu) kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan upaya penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar/prosedur penanganan yang diselenggarakan berdasarkan sistem komando penanganan darurat;
- b. bahwa sesuai Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, pada saat status keadaan darurat bencana provinsi ditetapkan, diaktifkan perangkat berupa Pos Komando;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pos Komando Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 218/KEP/HK/2024 tentang Status Keadaan Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN: ...




MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** : Pos Komando Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas adalah sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan daerah dalam pencegahan dan penanganan bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. mengoordinasikan pencegahan dan penanganan bencana kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan secara terpadu di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. melaksanakan pencegahan dan penanganan bencana kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - d. merencanakan kebutuhan operasional dan kebutuhan sarana serta prasarana yang diperlukan dalam pencegahan dan penanganan bencana kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 September 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

- Tembusan :**
- 1. Menteri Koordinator Bidang PMK Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
 - 4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
 - 5. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
 - 6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
 - 7. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
 - 8. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 9. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 10. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 11. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 12. Komandan Resort Militer 161/Wira Sakti Kupang di Kupang;
 - 13. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII di Kupang;
 - 14. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari di Kupang;
 - 15. Wali Kota Kupang di Kupang;
 - 16. Para Bupati se - NTT masing-masing di Tempat.

| Paraf Hierarki | |
|--------------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra |  |
| Kabag. Bantuan Hukum |  |

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 314 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 10 September 2024
TENTANG POS KOMANDO SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA KEKERINGAN
DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT
PENANGANAN BENCANA KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|----|--|----------------------|--|
| 1 | Gubernur Nusa Tenggara Timur | Pengarah | Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi NTT. |
| 2 | Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur | Pengarah | |
| 3 | Komandan Resort Militer 161 Wirasakti | Pengarah | |
| 4 | Komandan Pangkalan Udara El Tari Kupang | Pengarah | |
| 5 | Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII Kupang | Pengarah | |
| 6 | Kepala Kejaksaan Tinggi Kupang | Pengarah | |
| 7 | Kepala Pengadilan Tinggi Kupang | Pengarah | |
| 8 | Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Komandan Posko | a. mengoordinasikan seluruh kegiatan pelaksanaan pencegahan dan penanganan bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan serta mengupayakan bantuan sarana tenaga dan dana; b. memonitor dan mengevaluasi jalannya operasi pencegahan dan penanganan bencana kekeringan,kebakaran hutan dan lahan; c. memberi petunjuk teknis operasional pelaksanaan pencegahan dan penanganan bencana kekeringan,kebakaran hutan dan lahan; d. mendayagunakan dan mengerahkan sumber daya tenaga dan peralatan serta dana untuk melakukan operasi pencegahan dan penanganan bencana kekeringan,kebakaran hutan dan lahan; dan e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur |
| 9 | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT | Wakil Komandan Posko | |
| 10 | Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT | Koordinator | a. melaksanakan kegiatan kesekretariatan; b. melaksanakan kegiatan pengelolaan data dan informasi; |

| | | | |
|--------------------------|--|-------------|--|
| | | | c. menyiapkan data dan informasi untuk dipublikasikan; d. menyiapkan bahan rapat evaluasi setiap hari; dan e. melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap hari kepada Komandan Posko secara tertulis dan secara langsung dalam rapat rutin posko. |
| 11 | Vinsesius Salo SE, MM/ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | a. melaksanakan kegiatan kesekretariatan; b. melaksanakan kegiatan pengelolaan data dan informasi; c. menyiapkan data dan informasi untuk dipublikasikan; d. menyiapkan bahan rapat evaluasi setiap hari; dan e. melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap hari kepada Komandan Posko secara tertulis dan secara langsung dalam rapat rutin posko. |
| 12 | Yemin Pongtuluran, SP/ Fungsional Perencana Ahli pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 13 | Ketut Sadnyana Yasa, SE/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 14 | Heyn Peter Ahab, S.STP, MA/ Analis Mitigasi Bencana pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 15 | Videlia G. Moruk, ST, MM/ Penyuluh Bencana pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 16 | Eddi Setyawan, ST/ Analis Penanggulangan Krisis pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 17 | Hansen Robinson Molana, S.Sos/ Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 18 | Moses Josinthus D. Seko, S.Kom/ Analis Penanggulangan Krisis pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 19 | Yusta Roli Ramat, S.Sos, M.M/ Penyuluh Bencana pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 20 | Maria Magdalena Lodo, S.Kom/ Ahli Pratama Pranata Komputer pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 21 | Celia Anggelina Nogo Koban, S.Kom/ Ahli Pratama Pranata Komputer pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 22 | Oce Nenotek, S.Si/ Staf pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 23 | Yoakim D. Masan, S.Kom/ Staf pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| A. BIDANG OPERASI | | | |
| 1 | Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Provinsi NTT | Koordinator | a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sub bidang operasi terkait pemadaman dan penyelamatan, penyaluran logistik dan sarana prasana, Pelayanan Kesehatan, serta ekonomi dan pemulihan dini; dan b. melaporkan Pelaksanaan kegiatan setiap hari kepada Komandan Posko dan Wakil Komandan Posko secara tertulis melalui sekretariat dan secara langsung dalam rapat rutin posko. |
| 2 | Kepala Badan SAR Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |




| • SUB BIDANG PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN | | | |
|---|---|-------------|---|
| 1' | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT | Koordinator | a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dari sub bidang dengan posko bencana Kabupaten/Kota dan para pihak terkait; dan b. melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap hari kepada koordinator bidang operasi. |
| 2 | Pasi Ops Rem 161 Wirasakti Kupang | Anggota | |
| 3 | Dir. Sabhara Polda Nusa Tenggara Timur | Anggota | |
| 4 | Kadis Ops pada Lanud El Tari Kupang | Anggota | |
| 5 | Seksi Operasi dan Siaga pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Klas I Kupang | Anggota | |
| 6 | Ronaldo D. A. Diaz Viera, S.STP/ Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 7 | Paulus Pempi Dei/ Pengadministrasi Umum pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 8 | Matias Pelando'u / Pengadministrasi Keuangan pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 9 | Karolus Sulaksono, S.Sos/ Staf Pelaksana pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 10 | Norman P.L.B. Riwu Kaho/Ketua FPRB Provinsi NTT | Anggota | |
| 11 | Don Fransisco O. Jagoagatho, S. Sos/Analis Bencana pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| • SUB BIDANG LOGISTIK, SARPRAS DAN DISTRIBUSI | | | |
| 1 | Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Provinsi NTT | Koordinator | a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dari sub bidang dengan posko bencana Kabupaten/Kota dan para pihak terkait; dan b. melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap hari kepada koordinator bidang operasi. |
| 2 | Kepala Bidang Operasi dan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT | Anggota | |
| 3 | Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air dan Jaringan Pemanfaatan Air pada BWS Nusa Tenggara II | Anggota | |
| 4 | Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas ESDM Provinsi NTT | Anggota | |
| 5 | Pasilog Korem 161 WirasaktiKupang | Anggota | |
| 6 | Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT | Anggota | |
| 7 | Yanti Y. Kana Tallo, S.Sos/ Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 8 | Jems Pallo, SE/ Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 9 | Mellyani Naema Daik, SE/ Staf pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 10 | Aldus Nikodemus Hauteas/ Staf pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 11 | Nasir Baki/ Staf pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 12 | Budaya Yones Kelendonu/ Staf pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| • SUB BIDANG LAYANAN KESEHATAN | | | |
| 1 | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT | Koordinator | a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dari sub bidang dengan posko bencana Kabupaten/Kota dan para pihak terkait; dan b. melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap hari kepada koordinator bidang operasi. |

| | | | |
|---|--|-------------|--|
| 2 | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah W. Z. Johannes Kupang | Anggota | a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dari sub bidang dengan posko bencana Kabupaten/Kota dan para pihak terkait; dan b. melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap hari kepada koordinator bidang operasi. |
| 3 | Johannes Marianus, ST/ Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 4 | Kosmas Neme, SH/ Analis Layanan Umum pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 5 | Nurhayati Burhan, SP/ Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 6 | Juliana R. da Costa, S.Sos/ Bendahara pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 7 | Willi Roni Rusdi Damaledo/ Pengadministrasi Keuangan pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 8 | Yohana Dua Kuki, S.Pd/ Staf Pelaksana pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 9 | Koordinator PKBI Provinsi NTT | Anggota | |
| 10 | Koordinator MDMC NTT | Anggota | |
| • SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMULIHAN DINI | | | |
| 1 | Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Provinsi NTT | Koordinator | a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dari sub bidang dengan posko bencana Kabupaten/Kota dan para pihak terkait; dan b. melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap hari kepada koordinator bidang operasi. |
| 2 | Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT | Anggota | |
| 3 | Syafrudin Herman, SE, MM/ Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 4 | Yesmon Robinson Noach, S.Sos/ Penyusun Rencana Rehabilitasi pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 5 | Jecson Alexander Saly, S.T/ Analis Bangunan dan Perumahan pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 6 | Desriyantho Zacharias/ Staf pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| B. BIDANG KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM | | | |
| 1 | Direktur Operasional POLDA NTT | Koordinator | a. memastikan keselamatan terhadap seluruh anggota (personil) Posko dan masyarakat di daerah bencana; dan b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka dukungan kegiatan pengamanan dan penegakan hukum. |
| 2 | Kepala Seksi Operasional pada Korem 161 WS Kupang | Anggota | |
| 3 | Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT | Anggota | |
| 4 | Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |
| 5 | Richard P. L. Pelt, SE/ Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 6 | Tinike Aplonensi Dima, S.Sos/ Analis Layanan Umum pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 7 | Prima Patamorgana, ST/ Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |

| | | | |
|----|---|---------|--|
| 8 | Veronica A. Johannis, SH/ Analisis Penanggulangan Krisis pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | a. memastikan keselamatan terhadap seluruh anggota (personil) Posko dan masyarakat di daerah bencana; dan b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka dukungan kegiatan pengamanan dan penegakan hukum. |
| 9 | Markus Mapa, SH/ Analisis Layanan Umum pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |
| 10 | Hajrat Kumpu, A.Ma/ Staf pada BPBD Provinsi NTT | Anggota | |

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

| Paraf Hierarki | |
|--------------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra |  |
| Kabag. Bantuan Hukum |  |